

# KAJIAN INFRASTRUKTUR DI PROVINSI MALUKU

Abraham Kalalimbong\*

## Abstract

Infrastructure is prerequisite in order to various of society activities can take place. Infrastructure that often conceived of prasarana and physical medium can be interpreted as physical building for the sake of and public safety for example: transportation is entered street, irrigation, clean water and also sanitation, electric power, telecommunications. Infrastructure has very strong dependability with society prosperity and economic growth, as the same manner as can be pinpointed with indication that area that have equipment of infrastructure system that better, have prosperity level and economic growth better also. More complete Infrastructure and can be functioned full in society system can depress production cost, until infrastructure existence can give picture about ability of society production and at the same time express prosperity level or standard of society life.

**Keyword:** *Infrastructure, Provinsi Maluku*

## I. Pendahuluan

Infrastruktur merupakan fasilitas utama dan terpenting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas *transportasi* misalnya memungkinkan orang, barang dan jasa diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya, perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Pemerintah daerah Provinsi Maluku menyadari perlunya dukungan infrastruktur yang lebih memadai guna menjamin terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Tersedianya infrastruktur yang memadai diharapkan akan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Maluku, mengingat infrastruktur merupakan salah satu determinan penting dari investasi. Hal ini pada gilirannya diharapkan akan dapat meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru. Dari sisi pengembangan wilayah, tersedianya infrastruktur diharapkan dapat mempermudah upaya-upaya pemerataan pembangunan khususnya di wilayah belum berkembang dan daerah terpencil. Dari aspek social, penyediaan infrastruktur memberikan peluang bagi pengurangan kemiskinan melalui penyediaan kesempatan kerja pada tahap pembangunan maupun dengan meningkatkan akses dan setelah infrastruktur tersebut dioperasikan masyarakat miskin mampu mendapatkan kualitas layanan kebutuhan dasar yang lebih baik sekaligus membuka akses pada potensi kegiatan ekonomi yang lebih produktif.

Kondisi Provinsi Maluku sebagai Provinsi Kepulauan, telah menyebabkan kegiatan produksi dan perdagangan di daerah ini relative lebih mahal. Pada daerah-daerah yang relative terpencil dan terisolasi, kegiatan produksi dan perdagangan relative terbatas, karena tingginya biaya produksi dan perdagangan. Kondisi ini lebih diperparah oleh terbatasnya sarana dan prasarana pendukung. Kondisi terbatasnya infrastruktur di Maluku juga dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Pusat, yang membatasi pengeluaran untuk bidang infrastruktur di Indonesia pada periode sebelumnya.

## II. Kajian Pustaka

### 2.1 Infrastruktur Provinsi Maluku

#### 2.1.1 Transportasi

Daerah Maluku merupakan daerah kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan + 91 persen, karena terdiri dari pulau-pulau sehingga prioritas pembangunan di sub sektor perhubungan laut dan udara merupakan pilihan utama dalam rangka percepatan pembangunan bidang lainnya di daerah ini. Perhatian terhadap pembangunan transportasi sub sektor perhubungan laut dan udara tidak dimaksudkan untuk mengecilkan peranan dari sektor lain khususnya sub sektor transportasi darat. Hal ini karena sub sektor transportasi darat hanya bermanfaat pada daerah yang tidak dipisahkan oleh laut atau satu pulau saja. Dari pengamatan kami hampir semua armada transportasi udara yang ada di provinsi Maluku sudah tergolong pesawat tua kecuali boing 739 buatan tahun 2008.

---

\**Abraham Kalalimbong; Dosen Program Studi Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Unpatti Ambon*

### III. Analisa Data Pembahasan

#### a. Data Lapangan Terbang di Provinsi Maluku

No	Lapangan Terbang	Kelas	Panjang Landasan Pacu (m)	Lebar Landasan Pacu (m)	Kapasitas Pendaratan
1.	Ambon Pattimura	Domestik	2.500	45	Air Bus 320 & Boing 739
2.	Maluku Tengah	Domestik	900	30	C-212
3.	Banda	Domestik	1.050	23	C-212
4.	Naira Amahai Wahai	Domestik	750	23	C-212
5.	Seram Bagian Timur Bula (swasta)	Domestik	900	23	C-212
6.	Buru Namlea	Domestik	750	23	C-212
7.	Namrole	Domestik	900	23	C-212
8.	Maluku Tenggara Dumatubun-Langgur	Domestik	1.300	30	ATR, Nomed
9.	Maluku Tenggara Barat	Domestik	900	23	ATR, Nomed
10.	Olilit-Saumlaki	Domestik	800	23	C-212
11.	Kisar Saumlaki Larat	Domestik	800	23	C-212
12.	Aru Dobo	Domestik	400	23	C-212
13.	Benjina (Swasta)	Domestik	1.400	18	C-212

Sarana dan prasarana transportasi laut masih jauh dari harapan dimana rata-rata masyarakat belum dapat menikmati angkutan dengan aman, nyaman dan terjangkau oleh masyarakat pada umumnya. Fasilitas angkutan kapal yang terjangkau dari sisi ekonomi masyarakat sekarang yang dapat berlayar jauh menjangkau pulau-pulau terpencil dimana kebanyakan masyarakat ada disana adalah kapal perintis, kapal perintis dijadikan angkutan alternative karena kapal yang lebih baik tidak ada. Kapal perintis dijadikan sebagai angkutan penumpang barang dan hewan ternak, kapal ini kecepatannya lamban dikenal sebagai angkutan serba guna. Untuk sarana transportasi laut yang lebih dekat digunakan kapal-kapal kayu, tentu aturan standart keselamatan tidak ada. Nakoda dan ABK mungkin tidak memiliki lisensi berlayar.

#### b. Data Pelabuhan Di Provinsi Maluku

No	Kabupaten/Kota	Nama Pelabuhan	Konstruksi Dermaga	Ukuran Dermaga (m)	Kedalaman Pelabuhan (M/LWS)
1.	Maluku Tenggara Barat	Saumlaki Larat	Beton	100 x 8	11-9
2.			Beton	56 x 6	9-7
3.	Maluku Barat Daya	Tepa Kisar/Wonreli Moa	Beton	16,6 x 4,5	9-7
4.			Beton	16 x 4,5	8-6
5.	Maluku Tenggara	Elat	Beton/Kayu	50 x 6	8-6
6.	Maluku Tengah	Amahai	Beton	72 x 6	9-7
7.		Tehoru	Beton	48 x 5	9-7
8.		Wahai	Beton	70 x 6	8-6
9.		Kobisonta	Beton	70 x 6	9-7
10.		Tulehu	Beton	200 x 5	8-6
11.		Hitu	Beton	40 x 10	8-6
12.		Haria	Kayu	50 x 5	7-5
13.		Tuhaha	Beton	15 x 4	12-10
14.		Banda	Beton	92,5 x 6	8-6
15.	Seram Bagian Timur	Geser Kataloka Bula Gorom	Beton/Kayu	50 x 6	7-5
16.			Kayu	50 x 6	8-6
17.			Kayu	40 m	12-10
18.			Beton	45 x 5	8-6
19.	Seram Bagian Barat	Piru Kairatu	Beton	48 x 5	-
20.			Kayu	16 x 4,5	8-6
21.	Buru	Namlea	Beton	60 x 6	12-10
22.	Buru Selatan	Namrole Leksula	Beton	35 x 5	9-7
23.			Beton	42 x 6	8-6
24.	Aru	Dobo Kalakalar	Beton	129 x 11	9-7
25.			Beton	134 x 8	10-8
26.	Ambon	Yosudarso Slamet Riadi Siwabesi	Beton	576 x 6	12-10
27.			Beton	150 x 6	8-6
28.			Beton	60 x 6	8-6
29.	Tual	Tual	Beton	125 x 6	8-6
30.					

Pembangunan sub sektor transportasi darat belum dapat dikatakan berhasil dengan mulus. Hal ini disebabkan karena pembangunan jalan raya di daerah-daerah tertentu belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah, khususnya pada daerah-daerah terpencil. Penyebabnya bukan saja karena kurangnya material perkerasan jalan atau jauhnya mobilisasi bahan bangunan tetapi juga menyangkut ketersediaan sarana lain seperti kendaraan. Panjang jalan Raya di Maluku untuk status Jalan Nasional dan Jalan Provinsi sampai dengan tahun 2007 adalah 1 885,22 Km yang terdiri dari 985,46 Km jalan Nasional, 899,77 Km jalan Provinsi.

#### c. Panjang Jalan Nasional dan Provinsi di Provinsi Maluku

No	Uraian	Jalan Nasional	Jalan Provinsi
I	Permukaan Jalan	985,46	899,77
	Diaspal	644,29	647,21
	Kerikil	188,24	50,12
	Tanah	152,93	202,44
II	Kondisi Jalan	985,46	899,77
	Baik	482,89	351,48
	Sedang	85,85	198,22
	Rusak Ringan	227,09	106,85
	Rusak Berat	189,63	243,22
III	Fungsi	985,46	899,77
	Arteri	43,45	-
	Kolektor	942,01	899,77
	Lokal	-	-
	Tidak Dirinci	-	-

**d. Panjang Dan Status jalan Di Provinsi Maluku**

Kabupaten/Kota	Nama Pulau	Panjang Jalan (Km)		
		Nasional	Provinsi	Kabupaten
Maluku Tenggara Barat	Yamdena	154.89		120.40
	Larat			100.00
Maluku Barat Daya	Wetar	50.00		290.00
	Babar		45.00	115.00
	Romang			10.00
	Moa			45.00
Maluku Tenggara	Kei Besar			226.40
Maluku Tenggara & Kota Tual	Kei Kecil		115.12	196.70
Maluku Tengah & Kota Ambon	Ambon	68.81	130.38	218.23
Maluku Tengah, SBB & SBT	Seram	457.58	464.73	483.48
Maluku Tengah	Saparua		34.47	22.60
	Haruku		29.00	27.50
	Banda			13.00
Buru & Buru Selatan	Buru	254.18	57.77	142.30
Kabupaten Aru	Aru		23.30	628.30
Seram Bagian Timur	Gorom			30.00
	Geser			1.00
<b>J U M L A H</b>		985.46	899.77	2,669.91

**e. Irigasi Maluku**

Daerah irigasi yang sudah dibangun di Provinsi Maluku saat ini seluas 14.250 Ha dengan penyebaran sebagai berikut:

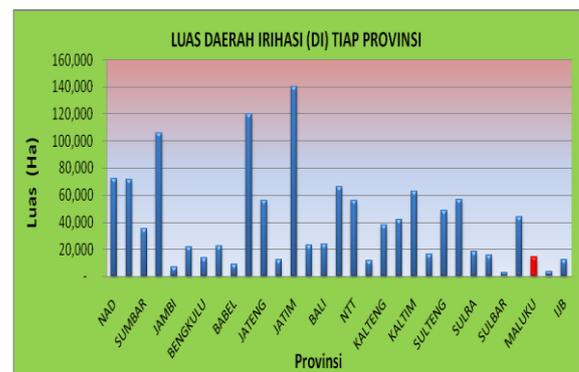
No.	Kawasan Irigasi	Luas Areal Potensial (Ha)	Bangunan Pengambilan
I	Pulau Seram		
	Dataran Pasahari & Kairatu	2.217	Free Intake
	- DI. Samal	2.898	Free Intake
	Kanan	750	Free Intake
	- DI. Kobi	1.842	Bendung
	- DI. Lofin	715	Bendung
	- DI.	545	Bendung
	Matakabo Kiri	61	Free Intake
	- DI.		
	Kairatu I		
	- DI.		
Kairatu II			
- DI. Kawa			
<b>Jumlah I</b>		9.028	
II	Pulau Buru		
	DAS Way Apu		
	- DI. Geren	750	Bendung
	- DI. Meten	2.020	Bendung
	- DI. Tele	200	Air Tanah
	- DI. Dini	396	Bendung
	- DI.	625	Bendung
	Leman/Tina	300	Bendung
- DI. Lo	931	Bendung	
- DI. Lata			
<b>Jumlah II</b>		5.222	
<b>Total I+II</b>		14.250	

Daerah Irigasi potensial yang dapat dikembangkan seluas 40.350 Ha dengan penyebaran sebagai berikut:

No.	Kawasan Irigasi	Luas Areal Potensial (Ha)
I	Pulau Seram	24.690
	Dataran Pasahari	
	- DI. Isal	1.030
	- DI. Sari	1.022
	Putih	2.500
	- DI.	1.000
	Samal Kiri	1.300
	- DI. Musi	800
	- DI. Boti	1.038
	- DI.	
	Musal	9.000
- DI.		
3	Matakabo Kanan	7.000
II	Kawasan Bubafulo	5.660
	DAS Masiwang	5.660
III	1	
	Pulau Buru	10.000
	DAS Way Apu	
	Pulau Babar	
	DAS Pulau Babar	
<b>Jumlah</b>		40.350

Mengamati tabel yang ada diatas maka hanya pulau Seram dan pulau Buru saja yang ada irigasi teknis, keadaan ini terkondisi dengan topografi daerah yang bersangkutan, pulaunya besar dan juga hanya pulau seram dan buru saja yang memilik sumber daya air yang dapat dimanfaatkan sebagai pengairan.

Dari 14.250 ha irigasi teknis yang ada di provinsi Maluku dibandingkan dengan seluruh Indonesia maka hanya 1,15 % saja luas irigasi teknis yang ada di Maluku. Provinsi Maluku masih mengimpor beras dari daerah lain.

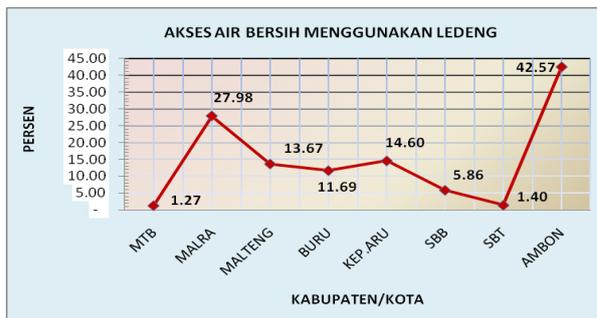


Sumber: Direktorat pengairan dan Irigasi, 2008

**f. Air Bersih**

Disadari bahwa air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, olehnya itu ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan

tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah. Pada tahun 2006, rumah tangga di Maluku yang menggunakan air ledeng sebagai sumber air minumnya baru mencapai 17,66 %. Sementara bila dilihat antar kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten yang memiliki rumah tangga pengguna air minum ledeng kurang dari 10 %, yaitu Kabupaten MBT 1,27 %, Kabupaten Seram Bagian Timut 1,40 % dan Kabupaten Seram Bagian Barat 5,86 %. Angka-angka ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih masih sangat rendah.



Berbagai upaya secara bertahap telah dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih, pemamfaatan air baku telah dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kebijakan pengembangan air baku dan pendayagunaan air tanah melalui pembangunan sarana dan prasarana air baku, sumur dangkal dan embung

**g. Kelistrikan**

Di Provinsi Maluku, potensi energi belum dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga operasionalisasi ketenagalistrikan masih sangat tergantung tenaga mesin diesel dengan bahan bakar minyak solar sebagai energy primernya.

Dengan geografis wilayah Maluku yang terdiri dari banyak pulau, maka sistim yang digunakan dalam pengoperasian listrik di Provinsi Maluku seluruhnya menggunakan sistim isolated dengan hanya memiliki tegangan menengah dan tegangan rendah yang tersebar sesuai lokasi pembangkit, dan sampai saat ini pembangkit yang digunakan semuanya bertenaga diesel.

Kapasitas terpasang *pembangkit listrik tenaga diesel* (PLTD) maupun generator set yang disewa serta jumlah unit pembangkit PLN yang beroperasi di wilayah Maluku mencapai 131.911 KW dari 220 unit pembangkit yang dapat beroperasi, dengan kapasitas terbesar adalah PLTD Poka dan Hative Kecil – Ambon yaitu sebesar 63.072 KW dari 17 unit pembangkit yang ada. Total kapasitas terpasang

seluruh system pembangkit menurun 4,11 % dari 137.568 KW (2006). Prosentase kapasitas terpasang perjenis pembangkit adalah aebagai berikut : PLTD PLN adalah sebesar 121.911 KW atau 92,42 % dan sewa genset adalah sebesar 10.000 KW atau 7,58 %.

Beban puncak mencapai 61.898 KW (2007), meningkat 19,43 % dibandingkan tahun 2006 sebesar 51.828 KW, sedangkan daya mampu pembangkit sebesar 75.923 KW menurun 7,90 % dari pada tahun sebelumnya sebesar 82.431 KW. Dengan demikian pada tahun 2007 secara keseluruhan system, daya cadangan yang tersedia sebesar 14.025 KW atau 22,66 %. Namaun demikian jumlah cadangan pada daya tersebut tidak menggambarkan keadaan system-sistem kelistrikan secara keseluruhan karena system kelistrikan yang ada beroperasi secara isolatet di 70 pusat pembangkit listrik dengan lokasi tersebar.



Pada saat ini kemampuan PT PLN untuk menyediakan daya sangat terbatas di hampir seluruh pembangkit di wilayah Maluku.

Pemakaian listrik pada saat beban puncak seringkali sudah melampaui perkiraan kemampuan PLN untuk menyediakan pasokan listrik bagi para pelanggan. Kondisi ini semakin parah dengan adanya perawatan pembangkit listrik sehingga otomatis terjadi pemadaman bergilir pada pelanggan. Pemadaman ini menunjukkan krisis listrik yang sering terjadi, artinya permintaan tidak seimbang dengan pasokan.



Dalam pengoperasian kelistrikan di Maluku dilaksanakan oleh dua cabang utama, yaitu cabang Ambon dengan wilayah kerja meliputi Ambon, Pulau-pulau Lease, Seram dan Buru ; dan Cabang Tual dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Maluku Tenggara.



Konsumsi energy listrik di Maluku didominasi oleh kelompok pelanggan rumah tangga yang mencapai 93,35 % dari total jumlah sebesar 171.586 pelanggan, sedangkan untuk kepentingan komersial dan industri belum dapat dipenuhi secara optimal. Tingginya beban operasional kelistrikan di Maluku yang bertumpu pada tenaga diesel sebagai pembangkitnya sangat tergantung dari bahan bakar minyak yang disuplai secara kontinyu sebagai energy primernya. Keberadaan listrik pedesaan sangat penting artinya saat ini pada wilayah pedesaan masih banyak desa-desa yang belum terlistriki dari total jumlah desa 864 yang belum terlistriki adalah 33,22 % atau 287 desa.

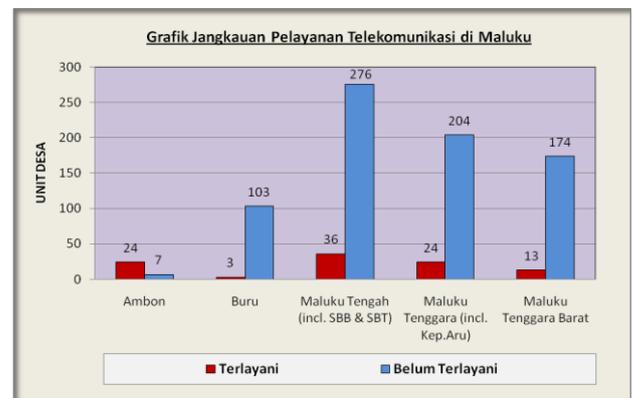
Jumlah Desa Yang Belum Terlistriki di Provinsi Maluku, (Kajian Infrastruktur Provinsi Maluku 2008).

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Belum Terlistriki
1	Kepulauan Aru	51
2	Maluku Tenggara	41
3	Seram Bagian	12
4	Barat	7
5	Seram Bagian	20
6	Timur	19
7	Maluku Tengah	137
	Buru	
	Maluku Tenggara Barat	
	<b>J u m l a h</b>	<b>287</b>

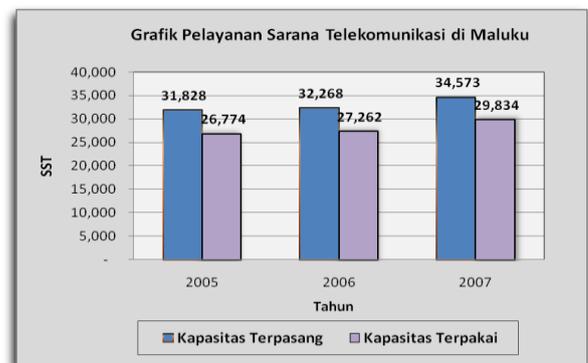
**h. Telekomunikasi**

Pada kenyataannya hingga saat ini hanya sebagian kecil masyarakat di Maluku yang mampu mengakses informasi. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh kurangnya infrastruktur telekomunikasi. Berbagai layanan telekomunikasi dan informasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat tanpa adanya infrastruktur yang memadai.

Jangkauan pelayanan telekomunikasi di Maluku belum maksimal, saat ini baru 11,57 % desa yang tersedia layanan telekomunikasinya. Daerah yang tidak mempunyai akses yang memadai tentu akan menjadi terisolasi dan tertinggal.



Gambaran diatas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan pelayanan telekomunikasi maka pada tahun 2007 dilakukan penambahan kapasitas terpasang sebesar 2.305 SST dari 32.268 SST di tahun 2006, namun demikian jangkauan pelayanannya masih terbatas pada 100 desa yang terlayani. Selain penambahan kapasitas, juga dilakukan perbaikan perangkat VSAT pada 11 lokasi di Pulau Seram dan 5 lokasi di Maluku Tenggara.



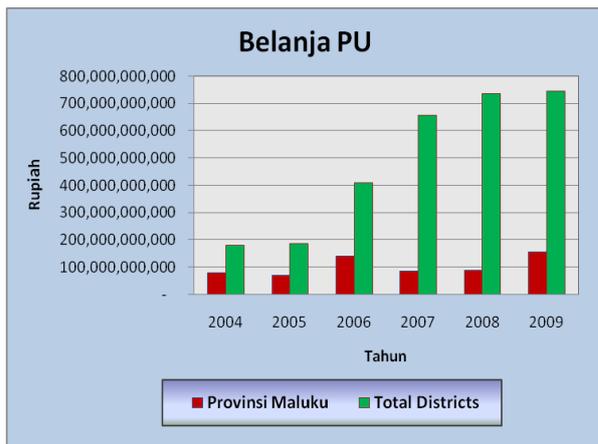
**i. Belanja Sektor Pekerjaan Umum**

Pada table dibawah memperlihatkan bahwa belanja di kabupaten/kota terus meningkat dari tahun ke tahun pasca kerusuhan social dan keamanan mulai kondusif. Sedangkan tahun 2008-2009 belanja sector

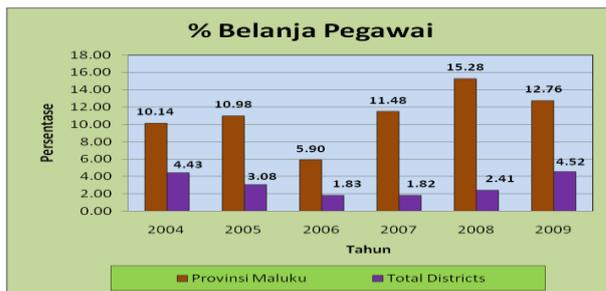
infrastruktur cenderung stabil seiring keamanan yang makin baik kepercayaan masyarakat makin kuat dan investor mempercayakan modalnya. Sedangkan belanja infrastruktur provinsi cenderung stabil.

Belanja sector Pekerjaan Umum di Provinsi Maluku

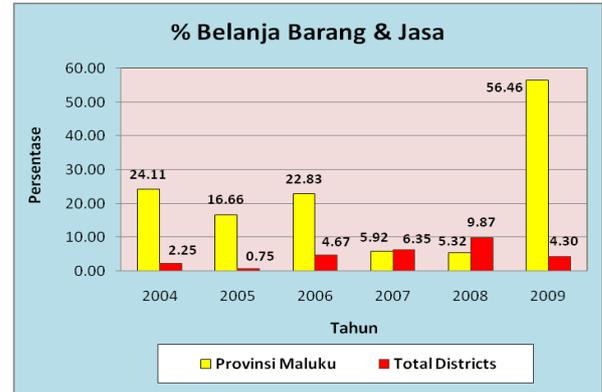
Tahun	Provinsi Maluku (Rp)	Total Districts (Rp)	Total (Rp)
2004	78,264,539,432	179,154,918,739	257,419,458,171
2005	69,996,816,060	185,676,777,010	255,673,593,070
2006	139,062,486,143	408,271,058,575	547,333,544,718
2007	84,037,444,484	655,316,541,516	739,353,986,000
2008	88,308,873,000	735,225,431,665	823,534,304,665
2009	154,706,745,360	744,440,939,356	899,147,684,716



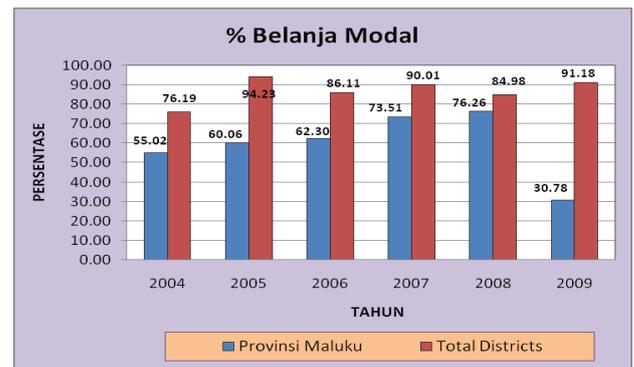
Dibandingkan dengan pos belanja yang lain maka pos belanja modal yang paling tinggi prosentasi belanjanya, diikuti pos belanja barang dan jasa kemudian pos belanja pegawai dan paling kecil pada pos belanja lain-lain dan perjalanan dinas. Untuk belanja lain-lain dan perjalanan dinas kami tidak tampilkan dalam diagram prosentase belanja.



Pada pos belanja pegawai terjadi pluktuasi belanja yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tahun 2004 dan 2005 keamanan yang belum kondusif, dan mulai tahun 2006 prosentase belanja modal serta barang&jasa meningkat karena keamanan sudah mulai kondusif yang berarti belanja pegawai prosentasenya menurun.



Khusus tahun 2009 untuk provinsi prosentase belanja pada pos belanja barang dan jasa lebih besar dari belanja modal yaitu sebesar 56,46 % sedangkan pada pos belanja modal menurun hanya sebesar 30,78 %. Keadaan ini dapat dipahami dimana periode waktu tertentu akan ada peremajaan atau pergantian kerusakan inventaris. Demikian halnya dengan usaha untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur maka tentu akan ada belanja terserap kesana.



IV. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Provinsi Maluku yang secara geografis merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari banyak pulau, dengan sendirinya telah terbentuk rentang kendali yang panjang sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan dalam rangka penciptaan kesatuan wilayah

yang terintegrasi, dengan demikian proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dalam mendukung percepatan pembangunan wilayah di Provinsi Maluku, ketersediaan infrastruktur sangat diperlukan untuk merangsang dan mendukung aktivitas pembangunan, baik pembangunan social maupun ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat kedepan dapat diupayakan secara maksimal.

### Saran

Diharapkan dicapai sasaran pembangunan transportasi jalan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan , peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan nasional dan provinsi untuk mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan serta mendukung kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman. Pembangunan jalan di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan pedalaman, pulau-pulau kecil yang terpadu dengan pengembangan wilayahnya. Melakukan koordinasi diantara tingkatan pemerintah untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan serta mengharmonisasikan keterpaduan system jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah dan system transportasi wilayah. Penyediaan pelayanan angkutan laut perintis dan angkutan penumpang kelas ekonomi yang nyaman dan terjangkau oleh masyarakat umum. Penyediaan dan peningkatan kapasitas prasarana transportasi laut seperti dermaga. Melengkapi fasilitas keselamatan pelayaran. Meningkatkan kapasitas bandara diseluruh Provinsi Maluku. Peningkatan pemeliharaan dan operasional prasarana transportasi udara. Melengkapi fasilitas keselamatan penerbangan yang kurang dibandara.
- 2). Pengembangan dan pengelolaan jaringan air irigasi. Melakukan perawatan jaringan irigasi teknis yang sudah ada. Membimbing, mengarahkan serta memberi penyuluhan teknis bagaimana mengelola air irigasi dengan benar dan tata cara bercocok tanam yang benar.
- 3) Pemerintah memperhatikan edukasi pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air yang layak dikonsumsi. Pemerintah diharapkan memberi penyuluhan cara teknologi (pembuatan sumur dan penjernihan) yang praktis dan standart dalam mengusahakan instalasi sederhana air bersih.
- 4) Diharapkan pemerintah mengalokasikan belanja pada pembangunan sumber air bersih.

Diharapkan pemerintah memberi penyuluhan drainase limbah rumah tangga yang baik.

- 5). Pengembangan upaya pemanfaatan sumber energy lain selain BBM seperti gas, batu bara dan panas bumi serta energy baru terbarukan untuk pembangkit tenaga listrik pedesaan. Perluasan pelayanan tenaga listrik di wilayah-wilayah pedesaan dan terpencil. Mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan mengupayakan peningkatan ketersediaan tenaga listrik terutama wilayah yang mengalami krisis listrik.
- 6) Meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi yang efisien dan kopetitif. Pembukaan peluang usaha dan pengembangan pola kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informasi termasuk di wilayah non-komersial.

### Daftar Pustaka:

- Anonimous 2009 Maluku Dalam Angka, BPS Badan Pusat Statistik Tahun 2009
- Anonimous 2009 Maluku Tenggara Barat Dalam Angka, BPS Badan Pusat Statistik Tahun 2009
- Anonimous 2009 Maluku Tenggara Dalam Angka, BPS Badan Pusat Statistik Tahun 2009
- Anonimous 2009 Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Tahun 2009
- Anonimous 2009 Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Tahun 2008-2013
- Anonimous 2009 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), Tahun 2009
- Anonimous 2009 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), Tahun 2009
- Anonimous 2009 Bahan Rakernas Departemen Pekerjaan Umum, Dinas PU Provinsi Maluku, Tahun 2008-2013
- Anonimous 2009 Laporan Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2008-2009
- Anonimous 2009 Laporan Kinerja Pembangunan Infrastruktur Bibang PU, Dinas PU Provinsi Maluku, Tahun 2009
- Anonimous 2008 Kajian Infrastruktur Wilayah Provinsi Maluku, Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku, Tahun 2008

Anonimous 2009 Profil Maluku, Badan Perencana  
Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi  
Maluku, Tahun 2009

Anonimous 2009 Practical Guidelines For Analyzing  
Public Expenditure At The Sub-National  
Level, World Bank, Tahun 2009